

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹⁵ Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lahir dari inisiatif masyarakat desa dan pemerintah desa untuk dijadikan sebagai wadah dalam menampung segala kegiatan baik bidang ekonomi, jasa pelayanan umum serta berbagai kegiatan yang menyangkut kepentingan umum masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang modalnya bersumber dari masyarakat. Selain itu, Badan usaha Milik Desa (BUMDes) juga dapat melakukan pinjaman modal kepada pihak lain, seperti pemerintah desa maupun pihak ketiga untuk dijadikan modal dalam pengelolaan atas potensi yang ada pada desa sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan

¹⁵ David Wijaya, *BUM DESA (Badan Usaha Milik Desa)*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), hal 98.

semakin meningkat.

2. Ciri-Ciri Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Adapun ciri-ciri yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa yaitu:

- a. Badan Usaha Milik desa dimiliki oleh institusi pemerintah desa dan dikelola oleh masyarakat secara bersama.
- b. Modal usaha diperoleh dari desa sebesar (51%) dan dari masyarakat sebesar (49%) melalui penyertaan modal.
- c. Operasional dijalankan sesuai dengan falsafah bisnis budaya local.
- d. Usaha yang dijalankan disesuaikan dengan potensi serta informasi pasar.
- e. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
- f. Di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama-sama¹⁶

Ciri-ciri yang disebutkan diatas merupakan suatu hal yang membedakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan badan usaha lainnya di desa. Hal tersebut, dapat dijadikan sebagai pengetahuan masyarakat terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) untuk dijadikan sebagai wadah atau perantara dalam

¹⁶ Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Bumdesa Lumbung Ekonomi Desa Petunjuk Praktis Pembentukan Bumdesa*, Desember 2015, hlm.3.

mengoptimalkan potensi yang terdapat di desa dan membantu masyarakat.

3. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Terdapat 4 (empat) tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa antara lain:¹⁷

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahan terhadap potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan serta pemerataan ekonomi pedesaan.

Perlu upaya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara efektif, efisien, profesional dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa untuk mencapai tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Upaya ini dilakukan mengingat Badan Usaha Milik Desa akan menjadi suatu badan usaha yang bekerja secara dominan dalam menggerakkan perekonomian desa karena kedudukannya sendiri yang dekat dengan masyarakat desa.

¹⁷ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: MitraWacana media), hal. 18.

4. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Terdapat beberapa prinsip pengelolaan BUMDesa yaitu:

- a. Kooperatif yaitu semua komponen yang ada pada BUMDes harus bekerja sama dalam pengembangan BUMDes.
- b. Partisipatif yaitu semua komponen yang berada dalam BUMDes harus bersedia dalam mengembangkan BUMDes.
- c. Emansipatif yaitu semua komponen yang ada pada BUMDes harus diperlakukan dengan sama tanpa dibedakan.
- d. Transparan yaitu semua aktivitas yang dikelola oleh BUMDes harus terbuka untuk semua lapisan masyarakat.
- e. Akuntabel yaitu semua kegiatan yang dijalankan BUMDes dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Subtainabel yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan oleh masyarakat.¹⁸

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), prinsip-prinsip yang telah dijelaskan diatas merupakan suatu hal yang harus terpenuhi dan dilakukan oleh setiap pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, dalam melakukan tugasnya semua komponen harus bekerja sama dengan baik dan memenuhi segala tanggungjawab sehingga tujuan dari rencana dapat dengan mudah dicapai. Karena apabila ada salah satu pihak yang bermasalah maka dapat mengganggu keseimbangan kerja sama antar pengelola.

¹⁸ Sudjito, *Prosiding Kongres Pancasila IV Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, (Yogyakarta: Psp Ugm, 2012), hlm. 334.

5. **Aktivitas dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)¹⁹**

Adapun aktivitas yang dilakukan dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai berikut:

a. Mendesain struktur organisasi

Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah organisasi sehingga dibutuhkan struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan yang harus tercakup di dalam organisasi serta bentuk hubungan kerja antara pengelola BUMDes

b. Menyusun uraian tugas (*Job description*)

Penyusunan uraian tugas diperlukan untuk memperjelas peran dari setiap orang, menghindari tumpang tindih sehingga memungkinkan posisi jabatan diisi dengan orang-orang yang kompeten dibidangnya.

c. Menetapkan sistem koordinasi

Koordinasi merupakan suatu aktivitas penyatuan berbagai tujuan parsial ke dalam satu tujuan umum. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dengan baik.

d. Menyusun bentuk dan aturan kerja sama dengan pihak ketiga

Kerja sama dengan pihak ketiga, baik menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam, penting diatur di dalam perjanjian kerja sama yang jelas dan saling menguntungkan.

¹⁹ David Wijaya, *BUM DESA (Badan Usaha Milik Desa)*,..., hlm. 141-143.

e. Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes

Agar seluruh pengelola BUMDes, pemerintah desa, badan kerja sama antar desa, serta para pemangku kepentingan memahami pedoman kerja organisasi BUMDes, perlu disusun AD/ART BUMDes sebagian rujukan mengelola BUMDes sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

f. Menyusun desain sistem informasi

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa dengan skema kerja sama antar desa yang bersifat terbuka sehingga perlu dibuatkan desain sistem informasi kinerja BUMDes dan aktivitas lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum.

g. Menyusun rencana usaha (*business plan*)

Rencana usaha perlu dibuat agar pengelola BUMDes memiliki pedoman jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan, sehingga kinerjanya terukur.

h. Menyusun sistem administrasi dan akuntansi

Hakikat dari sistem administrasi dan akuntansi merupakan pendokumentasian informasi secara tertulis berkaitan dengan aktivitas BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan dan secara mudah dapat ditemukan dan disediakan ketika diperlukan oleh para pemangku kepentingan.

i. Melakukan proses rekrutmen

Kriteria pengelola BUMDes mengacu pada peraturan perundang-undangan dan AD/ART BUMDes yang dibuat Dewan Komisaris BUMDes. Selanjutnya dibawa pada forum musyawarah antardesa untuk di sosialisasikan serta ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap pelamar dan memilih serta menetapkan orang yang paling sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

j. Menetapkan sistem penggajian dan pengupahan

Agar pengelola BUMDes dapat melakukan tugasnya dengan baik, diperlukan sistem imbalan yang tepat dan memacu motivasi dalam bekerja. Imbalan bagi pengelola BUMDes bisa berupa gaji bulanan atau upah kerja borongan bervariasi sesuai beban kerja atau pemberian insentif jika pengelola BUMDes bisa mencapai sasaran yang ditetapkan pada periode tertentu.

k. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan

Dibutuhkan pengelola BUMDes yang mampu mewujudkan gagasan inovatif dengan cara kreatif agar meningkatkan pendapatan dan meraih sukses. Pengelola BUMDes perlu berani mengembangkan usaha, menciptakan nilai tambah dengan memadukan sumber daya dan cara-cara yang baru agar dapat berdaya saing.

6. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu:

- a. Usaha sosial (*sosial business*) yaitu memberikan pelayanan umum kepada masyarakat desa dengan memperoleh keuntungan finansial. Contoh: usaha air minum, listrik, dan lumbung pangan.
- b. Usaha penyewaan (*renting*) yaitu melayani kebutuhan masyarakat desa serta memperoleh pendapatan asli desa. Contoh: penyewaan traktor, penyewaan gedung, penyewaan tanah, dan lain-lain.
- c. Usaha perantara (*brokering*) yaitu BUMDes sebagai jasa perantara kepada masyarakat. Contoh: memasarkan produk pertanian, memasarkan hasil peternakan, memasarkan produk kerajinan, dan lain-lain.
- d. Usaha berproduksi (*trading*) yaitu BUMDes memproduksi sendiri barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk dipasarkan. Contoh: pabrik es.
- e. Usaha bisnis keuangan (*financial business*) yaitu dengan memenuhi kebutuhan permodalan terhadap usaha masyarakat.
- f. Usaha bersama (*holding*) sebagai induk unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa maupun kawasan pedesaan.

Contoh: transportasi desa, desa wisata, kerajinan dan oleh oleh khas, dan lain-lain.²⁰

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat mengembangkan usaha yang dijalankan sesuai dengan bentuk serta kondisi dari BUMDes tersebut. Usaha yang dikembangkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BUMDes. Ketika memiliki jenis usaha harus memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat setempat sehingga usaha yang dijalankan dapat bertahan dalam waktu yang lama.

B. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diartikan juga sebagai kesejahteraan sosial, di mana dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 11 tahun 2009 dijelaskan mengenai kesejahteraan sosial “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.²¹

Kesejahteraan juga merupakan sebuah kondisi dimana seseorang merasakan segala suatu kebutuhan yang ia butuhkan dalam menjalankan kehidupannya telah didapatkan dan terpenuhi, sehingga dapat menunjang kualitas hidup dan menjadikan seseorang mampu menjalankan kodratnya

²⁰ Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, *Bumdesa Lumbung Ekonomi Desa Petunjuk Praktis Pembentukan dan Pengelolaan Bumdesa*, Desember 2015, hlm.3.

²¹ Ali Imron, “Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim”, Vol. 6, No. 1, 2012, hlm. 4.

sebagai seorang warga masyarakat tanpa harus memikirkan kesulitan-kesulitan akan kebutuhannya.

Pengertian kesejahteraan sosial dapat juga diartikan secara luas yang mencakup tindakan manusia dalam mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf hidup yang lebih baik tidak hanya diukur secara ekonomi serta fisik saja, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, mental, dan segi kehidupan spiritual. Kesejahteraan sosial dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu di antaranya sebagai berikut :

a. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan (kondisi)

Definisi kesejahteraan sosial dapat dilihat sebagai suatu kondisi tergambar dari definisi yang dikemukakan oleh Midgley, yaitu :

“a state or condition of human well-being that exists when social problems are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized”

(suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat di maksimalisasikan).²² Dapat diartikan bahwa manusia dapat melakukan segala kegiatan dan pekerjaannya dengan baik dan tanpa masalah ketika segala kebutuhan yang ia butuhkan telah terpenuhi.

Dari uraian diatas, menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial mempunyai tiga elemen yang utama yaitu :

²² Isbandi Rukminti Adi, *KESEJAHTERAAN SOSIAL (Pekerjaan sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018), hlm. 4.

- 1) Tingkatan di mana suatu masalah sosial dapat dikelola (*the degree to which social problems are managed*).
- 2) Sejauh mana kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi (*the extent to which needs are met*).
- 3) Tingkatan di mana kesempatan untuk mengembangkan diri disediakan ataupun difasilitasi oleh pemerintah (*the degree to which opportunities for advancement are provided*).

Ketiga unsur yang telah dijelaskan di atas menjadi tolak ukur dalam menilai kondisi kesejahteraan sosial masyarakat (*social well-being*).²³ Jadi, berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa seseorang dikatakan telah sejahtera ketika memenuhi salah satu ataupun ketiga daripada elemen-elemen yang telah dijelaskan di atas yaitu masalah sosial dapat dikelola atau dikendalikan, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, dan pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan diri.

b. Kesejahteraan sosial dalam kaitan dengan pembangunan sektoral

- 1) Kesejahteraan sosial dalam arti sempit

Kesejahteraan merupakan pengertian yang bersifat sektoral, yaitu salah satu sektor dalam pembangunan. Pengertian kesejahteraan dalam arti sempit mengacu pada kata *welfare*

²³ Isbandi Rukminti Adi, *KESEJAHTERAAN SOSIAL (Pekerjaan sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, hlm. 4-5.

bukan *social welfare* yang digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan sosial dalam arti sempit dan arti yang luas.²⁴

2) Kesejahteraan sosial dalam arti luas

Di Indonesia, kata kesejahteraan sosial sering dikaitkan dengan bidang yang dikerjakan oleh Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan rakyat (Komenko Kesra) serta Kementerian Koordinator Bidang Ekuin (Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Perdagangan), di dalamnya terdapat Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; Kementerian Agama; Kementerian Tenaga Kerja; Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan berbagai kementerian yang terkait lainnya.²⁵

Kesejahteraan sosial berdasarkan sektor pembangunan yang di definisikan oleh Spicker yang membahas mengenai kebijakan sosial, mengemukakan terdapat lima aspek utama yang perlu diperhatikan, kelima aspek ini dikenal dengan nama “big five” yaitu:

- 1) Kesehatan
- 2) Pendidikan
- 3) Perumahan

²⁴ Isbandi Rukminti Adi, *KESEJAHTERAAN SOSIAL (Pekerjaan sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*,..., hlm. 6.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

- 4) Jaminan sosial
- 5) Pekerjaan sosial

Kelima aspek ini sangat berkaitan erat dan berhubungan dengan kebijakan sosial dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.²⁶

c. Kesejahteraan sosial sebagai suatu layanan dan/atau sistem layanan

Definisi menurut Friedlander mengenai kesejahteraan sosial sebagai suatu layanan yaitu “*Social welfare is the organized system of social service and institutions, designed to aid individuals and group to attain satisfying standards of life and health*”. Dapat diartikan bahwa (kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari berbagai institusi dan layanan kesejahteraan sosial yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan).²⁷ Dengan kata lain, kesejahteraan merupakan sebuah pengaturan yang disusun dengan sistematis oleh berbagai layanan dan diperuntukkan terhadap masing masing individu maupun kelompok masyarakat dengan tujuan dapat meningkatkan standar hidup yang lebih layak.

Menurut Zastrow mengenai kesejahteraan sosial sebagai suatu “institusi” yaitu “*A natio’s system of programs, benefits, and services that help people meet those social, economic, educational, and health needs that are fundamental to the maintenance of society*” dapat

²⁶ Isbandi Rukminti Adi, *KESEJAHTERAAN SOSIAL (Pekerjaan sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*,..., hlm. 7.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

diartikan bahwa (suatu sistem nasional tentang berbagai program, manfaat dan layanan yang bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang merupakan hal yang mendasar untuk memelihara dan mempertahankan suatu masyarakat).²⁸ Jadi, kesejahteraan sosial merupakan sebuah sistem yang didesain dan dikelola dengan berbagai layanan didalamnya yang terhadap berbagai kebutuhan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang makmur.

d. Kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu

Berdasarkan perkembangannya, terdapat beberapa definisi yang menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu, yaitu:

- 1) Menurut Adi, Ilmu yang mencoba mengembangkan pemikiran, strategi dan teknik untuk meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat, baik level mikro, mezzo maupun makro.
- 2) Menurut Zastrow “*The study of agencies, programs, personnel and policies which focus on the delivery of social service to individuals, groups and communities*”.
- 3) Menurut Adi “Ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah

²⁸ Isbandi Rukminti Adi, *KESEJAHTERAAN SOSIAL (Pekerjaan sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*,..., hlm. 8-9.

sosial, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan memaksimalkan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang”.²⁹

Berdasarkan definisi diatas, ilmu kesejahteraan sosial adalah suatu ilmu yang bersifat terapan, sehingga kajiannya sangat berhubungan dengan intervensi terapan (perubahan sosial terencana) yang dilakukan oleh pelaku perubahan (*change agents*) terhadap berbagai sasaran perubahan (*target of change*) yang terdiri atas individu, keluarga serta kelompok kecil (level mikro), komunitas dan organisasi (level mezzo), dan masyarakat yang lebih luas, baik itu di tingkat kabupaten/kota, provinsi, negara ataupun tingkat global (level makro).³⁰

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Pradnyani dengan tujuan untuk meneliti bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa Genta Persada terhadap kesejahteraan masyarakat serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tibubeneng. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif bersifat kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradyani ialah peranan Badan Usaha

²⁹ Isbandi Rukminti Adi, *KESEJAHTERAAN SOSIAL (Pekerjaan sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*,..., hlm. 9.

³⁰ Isbandi Rukminti Adi, *KESEJAHTERAAN SOSIAL (Pekerjaan sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*,..., hlm. 9-10.

Milik Desa Gentha Persada dalam mensejahterakan masyarakat telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha didalamnya. Badan Usaha Milik Desa juga telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Tibubeneng sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa Gentha Persada telah memberikan sebagian keuntungan untuk menambah pendapatan asli desa Tebubeneng. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Badan Usaha Milik Desa dan kesejahteraan masyarakat, serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitian.³¹

Penelitian yang dilakukan oleh Priyanti dan Susiani dengan tujuan penelitian mengetahui peranan keberadaan BUMDes terhadap pendapatan nelayan desa sukorahayu. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dengan hasil penelitian diketahui bahwa BUMdes berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan sebesar 53,6% dari pendapatan sebelum adanya BUMDes. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah sama-sama membahas mengenai peran BUMDes. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah pada penelitian ini fokus

³¹ Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tibubeneng Kuta Utara", Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 9 No. 2, September Tahun 2019.

pada pendapatan nelayan, sedangkan pada penelitian saat ini fokus pada kesejahteraan masyarakat.³²

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dengan tujuan penelitian untuk menggali peranan BUMDes pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi DIY. Penelitian ini menggunakan pendekatan Community Based Research yang dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi secara langsung keadaan desa. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa keberadaan BUMDes membawa perubahan yang signifikan di bidang ekonomi dan juga sosial, BUMDes juga menambah pendapatan asli desa tetapi tidak bisa dirasakan masyarakat secara langsung yang menyebabkan warga berpendapat bahwa keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi dapat memunculkan ketidakpercayaan warga kepada kemampuan pengelolaan BUMDes. Profesionalisme menjadi tuntutan bagi pengelola BUMDes, kualitas pelayanan dan kemampuan mengelola organisasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.

³² Eka Parianti, Fitri Susiani, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur*, jurnal ilmiah keuangan dan perbankan, vol 2, no 2 November 2019, hal 1

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitian.³³

Penelitian yang dilakukan oleh Eikman dan Vinuzia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, dasar penelitian yang dipakai adalah wawancara dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat dikategorikan berada pada tingkat sejahtera I, akan tetapi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ternyata belum mampu memberikan pengaruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat atau belum mampu berperan secara maksimal sesuai dengan tujuan didirikannya lembaga usaha ini. Dari 4 unit usaha yang dibangun hanya beberapa saja yang berperan secara signifikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga hanya mengalami sedikit perubahan dalam hidupnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Dimana faktor pendukung dalam penelitian ini adalah ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Sedangkan faktor

³³ Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES Di Gunung Kidul, Yogyakarta", MODUS, Vol. 28 No.2, Tahun 2016.

penghambatnya adalah rendahnya ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengembangkan unit usaha yang dibangun, sehingga beberapa unit usaha tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah tidak adanya agenda sosialisasi yang direncanakan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga banyak dari warga masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami unit usaha yang dikembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai Badan Usaha Milik Desa dan Kesejahteraan Masyarakat dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek atau tempat penelitian.³⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Lazuardiah, Balafif, dan Rahmasari dengan tujuan mengetahui peran BUMDes dalam mendayagunakan potensi ekonomi lokal dengan beragam potensi yang dimiliki desa guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa serta mendorong peningkatan pendapatan asli desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data triangulasi (observasi, wawancara dan dokumentasi). Hasil dari penelitian ini adalah peran BUMDes Sumber Sejahtera dalam meningkatkan potensi dan

³⁴ Alfian Eikman dan Mala Vinuzia, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4 No. 3, Juli Tahun 2020.

kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Pujonkidul melalui program dan unit usahanya dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk warga, meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendorong peningkatan PAD Desa. persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah sama-sama meneliti mengenai BUMDes dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah objek penelitian.³⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Subehi, Luthfi, Mustofa, dan Gunawan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan model pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri, hambatan dan tantangan, serta peranan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ponggok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas menggunakan teknik triangulasi. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Desa Ponggok berhasil mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola aset serta potensi desa. Model dari pengelolaan BUMDes Tirta Mandiri dilakukan secara terstruktur, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat yang tinggi. Faktor pendorong perkembangan BUMDes Tirta Mandiri adalah sikap masyarakat dan pemerintah desa yang saling bekerja

³⁵ Elma Lazuardiah, Mohammad Balafif, Anggraeni Rahmasari, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada BUMDes Sumber Sejahtera, Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur*, Jurnal Bharanomics, Vol 1 No 1 2020, hal 9

sama, terbuka dan ramah terhadap pendatang serta pemanfaatan teknologi yang maksimal. Di sisi lain, persaingan dengan badan usaha jenis lain di desa menjadi faktor penghambat dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri. Penggabungan antara prinsip sosial (partisipasi masyarakat) dan prinsip ekonomi (pengelolaan unit usaha desa) sebagai upaya dalam memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitian.³⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Adinugraha dengan tujuan penelitian untuk mengetahui apakah BUMDes Singajaya sudah berperan secara optimal dalam mensejahterakan masyarakat Desa Bodas atau belum. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini pelaksanaa BUMDes Singajaya dalam perekonomian masyarakat Desa Bodas sudah berperan cukup baik dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat desa, membuka lapangan pekerjaan baru walaupun dalam skala kecil, serta peningkatan Pendapatan Asli Desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah sama-sama meneliti dan membahas mengenai BUMDes dan menggunakan metode

³⁶ Fajar Subehi, dkk, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten", Indonesian Journal of Anthropology, Vol. 3 No. 1 Juli Tahun 2018.

penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitian.³⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Salihin dengan tujuan penelitian untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya pengembangan ekonomi masyarakat Desa Pejanggik dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa peran BUMDes Desa Pejanggik tidak berjalan dengan baik dan belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pejanggik secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan modal, kesadaran masyarakat dan sumber daya manusia yang kurang mumpuni. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah sama-sama membahas mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah objek penelitian.³⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Utami, Tripalupi, dan Meitriana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan kesejahteraan anggota ditinjau dari dimensi *social value*, *civil society*, *innovation*, dan *economic activity*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam pengambilan data,

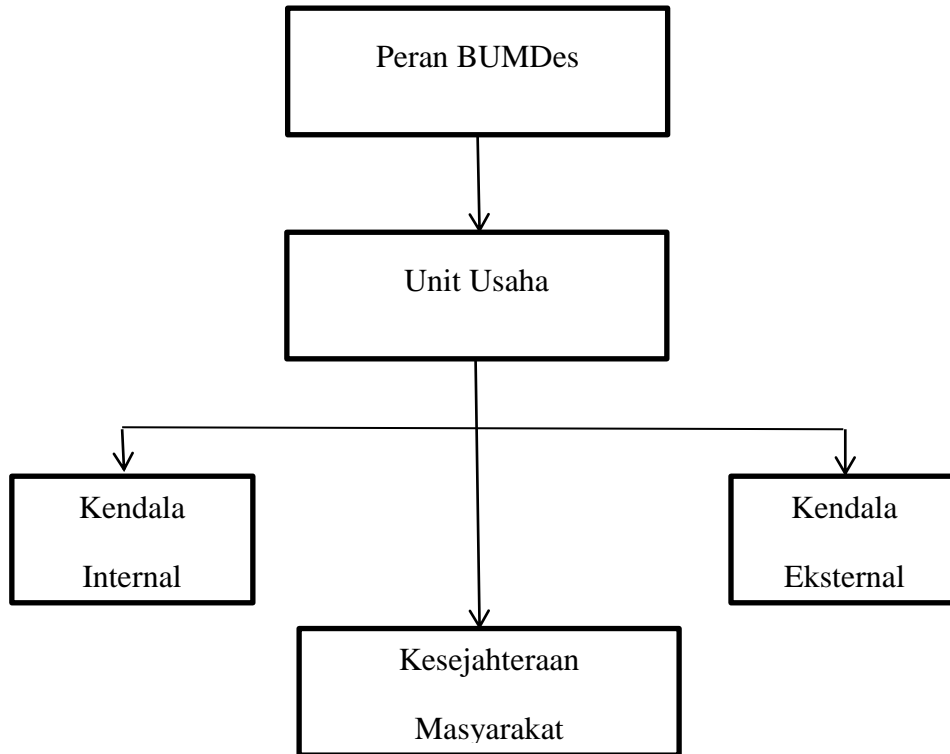
³⁷ Iit Novita Riyantidan Hendri Hermawan Adinugraha, *Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul)*, Jurnal Al-Idarah, vol 2 No 1, Februari 2021, hal 80

³⁸ Agus Salihin, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Pejanggik*, Jurnal Al-Intaj, Vol 7 No 1, Maret 2021, hal 103

penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data berupa angket/kuesioner. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa keberadaan BUMDes Bhuana Utama ditinjau dari dimensi *social value* berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggotanya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa BUMDes Bhuana Utama sangat membantu masyarakat dalam berbagai transaksi keuangan. Selain itu, juga terdapat pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah, pengembangan potensi wisata oleh BUMDes Bhuana Utama dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Panji. Ditinjau dari dimensi *civil society*, keberadaan BUMDes Bhuana Utama dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa Panji. Ditinjau dari dimensi *innovation* BUMDes Bhuana Utama telah senantiasa melakukan berbagai inovasi sosial sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa. Ditinjau dari dimensi *economic activity* BUMDes Bhuana Utama berdiri dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti simpan pinjam, pengelolaan air, pengelolaan sampah, pengelolaan hutan wisata, yang telah meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitian.³⁹

³⁹ Komang Sahita Utami, dkk, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial”, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 11 No.2, Tahun 2019.

D. Kerangka Berfikir



Keterangan dari Kerangka Berfikir:

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kendalrejo merupakan sebuah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui unit-unit usaha tertentu. Dalam hal ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kendalrejo memiliki beberapa unit usaha yang dijalankan. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kendalrejo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya juga tak lepas dari kendala yang dihadapi, baik kendala internal maupun eksternal. Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, tentunya membutuhkan sebuah solusi dari masing-masing kendala, sehingga Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) Kendalrejo dapat dengan maksimal atau berperan penuh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.